

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan EKonomi Digital Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1.</i> <i>Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan</i>					
1. 1	Indikator 1.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	Persentase	8-9%	8-9%	8-9%*	100%
1. 2	Indikator 1.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	Persentase	21,7%	21,7%	22,22%	102,39%
1. 3	Indikator 1.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Persentase	13,07%	13,07%	13,22	101,14%
II	<i>Sasaran Program 2.</i> <i>Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas</i>					
2. 1	Indikator 2.1 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	Persentase	8,27%	8,27%	10,33%	120%
2. 2	Indikator 2.2 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	Hari	1,7 hari	1,7 hari	1,29 hari	120%
III	<i>Sasaran Program 3.</i> <i>Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan</i>					
3. 1	Indikator 3.1 Indeks Litreasi Keuangan	Indeks	57,25	57,25	57	100%

IV	<i>Sasaran Program 4.</i> <i>Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas</i>					
4. 1	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	1	33,3%
V	<i>Sasaran Program 5.</i> <i>Terwujudnya penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas</i>					
5. 1	Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,41	113,6%
VI	<i>Sasaran Program 6.</i> <i>Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas</i>					
6. 1	Indikator 6.1 Persentase Pelaksanaan RB Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	85%	40%	45,45%	120%

Keterangan:

*) Nilai merupakan proyeksi capaian

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital pada Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program: Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan
---	--

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

- 1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB
- 1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB
- 1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB

Latar Belakang

Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB menjadi indikator penting dalam mencerminkan kemajuan transformasi ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. Ekonomi digital meliputi berbagai aktivitas yang didorong oleh teknologi digital, seperti *e-commerce*, layanan keuangan digital (*fintech*), aplikasi digital, serta digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti manufaktur. Peningkatan kontribusi ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi yang mendukung, percepatan literasi digital masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pelaku usaha digital. Untuk memastikan capaian yang optimal, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara lintas kementerian/lembaga. Target ini selaras dengan RPJMN dan Visi Indonesia Digital 2045, serta menjadi ukuran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan potensi ekonomi digital.

Pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Formula perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)} \\ = (\text{Nilai Tambah Ekonomi Digital} : \text{Nilai Produk Domestik Bruto}) \times 100\% \end{aligned}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB Tahun 2025 adalah sebesar 8–9%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025–2029. Hingga Triwulan II Tahun 2025, Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB yang telah terealisasi sebesar 8–9% atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	Persentase	8–9%	8–9%*	100% (Memuaskan)

*Keterangan: *) angka realisasi merupakan proyeksi*

Pada Triwulan II Tahun 2025, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB diperkirakan mencapai 8–9%. Meskipun kontribusi spesifik ekonomi digital terhadap PDB belum dirinci secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, beberapa indikator menunjukkan peran penting sektor ini dalam pertumbuhan ekonomi. Perekonomian nasional pada Triwulan II 2025 memperlihatkan pertumbuhan tahunan sebesar 5,12% (year-on-year), mencerminkan

stabilitas dan daya tahan ekonomi domestik. Di samping kontribusi sektor tradisional seperti konsumsi rumah tangga dan investasi, ekonomi digital memainkan peran penopang penting. Hal ini tercermin dari kenaikan signifikan pada transaksi ritel digital, daya serap uang elektronik (kartu debit dan kredit) meningkat 6,26% dan ekspansi aktivitas marketplace sebesar 7,5% secara kuartalan (Menko Perekonomian - Airlangga Hartarto, 5 Agustus 2025).

Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB tahun 2025 (target 8-9%) *dicasading non-direct* dari jumlah volume transaksi e-commerce dengan target tahunan sebesar 2,4 dan target triwulanan sebesar 0,6 miliar faktur transaksi. Pada Triwulan II Tahun 2025, jumlah volume transaksi e-commerce diproyeksikan tercapai dengan realisasi 0,91 miliar faktur transaksi (120%) dari target tahun 2025 sebesar 0,6 miliar faktur transaksi. Sampai dengan laporan ini disusun, laporan volume transaksi e-commerce yang diterbitkan Bank Indonesia belum tersedia, sehingga realisasi yang disampaikan masih bersifat proyeksi. Proyeksi disusun berdasarkan data realisasi volume transaksi e-commerce tahun 2024 yang bersumber dari Bank Indonesia, dengan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi digital pada tahun berjalan relatif sama dengan tahun sebelumnya, seiring dengan dampak perlambatan ekonomi yang tengah terjadi.

Proyeksi jumlah transaksi *e-commerce* pada triwulan II tahun 2025 diperkirakan tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya pada periode yang sama (triwulan II tahun 2024). Hal ini mengingat Pemerintah berupaya memberikan berbagai insentif seperti momentum kampanye belanja nasional dan global seperti Hari Belanja Online Nasional/HARBOLNAS, Flash Sale dan sebagainya, perluasan akses dan penggunaan digital bagi UMKM dan sebagainya. Oleh karena itu, diprediksikan jumlah transaksi *e-commerce* dapat dipertahankan dan bahkan meningkat sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB			
			Triwulan I
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Pengumpulan data dan informasi	Terlaksana	Koordinasi serta pengumpulan data dan informasi terkait identifikasi

	isu/permasalahan terkait e-commerce		isu/permasalahan, serta pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi <i>e-commerce</i> dengan melakukan diskusi bersama Prof. Babacan dari Australia
Triwulan II			
1	Penyelesaian isu/permasalahan terkait e-commerce	Terlaksana	<p>1. Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No:KWU.06.02/42/D.III.M.EKON.5/04/2025 tertanggal 14 April 2025 Perihal Tanggapan Atas Masukan Idea Terhadap RPMK PMSE yang diselenggarakan pada 17 April 2025. Ditindaklanjuti dengan penyampaian notula rapat No:KWU.06.02/04/D.III.M.EKON.5/04/2025 pada 17 April 2025;</p> <p>2. Koordinasi pembahasan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB berdasarkan undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No:KWU.06.01/73/D.III.M.EKON.5/06/2025 tertanggal 20 Juni 2025. Hal ini ditindaklanjuti dengan Notula Rapat B/KWU.06.01/42/D.III.M.EKON.5/06/2025 tertanggal 23 Juni 2025</p>

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan koordinasi rutin bersama Bank Indonesia terkait laporan volume transaksi *e-commerce* yang diterbitkan tahunan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya melakukan rapat secara fisik menggunakan fasilitas kantor sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp21.230.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Saat ini, ketersediaan data transaksi e-commerce secara triwulan masih terbatas dan tersebar di berbagai kementerian/lembaga, seperti Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, serta instansi lainnya yang memiliki mandat berbeda-beda. Hal ini menyebabkan keterlambatan konsolidasi dan ketidakseragaman metodologi pengumpulan data.
2. Adanya ketidaksepakatan antar Kementerian/Lembaga maupun pelaku dalam penyusunan RPMK PMSE;

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seperti koordinasi rutin dengan K/L terkait seperti pembentukan forum dialog antar K/L lintas sektor dalam rangka harmonisasi permasalahan yang ada.

1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB

Latar Belakang

Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB nasional merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian penguatan perdagangan nasional melalui proses sinkronisasi, koordinasi dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satuan TugasPeningkatan Ekspor Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Dewan Pengarah memiliki tugas-tugas antara lain:

- A. Merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsive;
- B. Menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor;
- C. Menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat yang timbul dalam proses peningkatan ekspor; dan
- D. Mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

Dan untuk mendukung pelaksanaan Keppres tersebut, telah disusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional.

Melalui Keppres dan Kepmenko Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, akan dilakukan perumusan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif, menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan, serta menyelesaikan permasalahan yang ada agar peningkatan nilai ekspor nasional pada tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Pengukuran kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB bertujuan untuk mengukur kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebagai indikator keberhasilan penguatan perdagangan Indonesia. Formula perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Nilai Ekspor Barang dan Jasa Nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)} \\ = ((\text{Nilai Ekspor Barang} \pm \text{Nilai Ekspor Jasa}) : \text{Nilai Produk Domestik Bruto}) \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB Tahun 2025 adalah sebesar 21,7%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB telah terealisasi sebesar 22,22% (proyeksi capaian PDB pada triwulan I Tahun 2025) atau mencapai 102,39% dari target Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	Persentase	21,7%	22,22%*	102,39%

*Keterangan: *) angka realisasi merupakan proyeksi berdasarkan Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB pada triwulan IV tahun 2024*

Sampai dengan laporan ini disusun, Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2025 belum diketahui dikarenakan jadwal rilis BPS pada awal Bulan Agustus 2025. Data yang disampaikan merupakan proyeksi berdasarkan realisasi pertumbuhan PDB pada Triwulan I Tahun 2025 yang telah dirilis pada Bulan Mei 2025. Adapun realisasi Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 21,38%. Dari kedua proyeksi tersebut, angka Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa pada Triwulan II diperkirakan setidaknya sebesar 22,22% dapat

tercapai, sehingga kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diperkirakan mencapai 102,39%.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Permendag No 8 Tahun 2024	Terlaksana	Telah dilaksanakan dan bentuk rapat koordinasi dan FGD dengan melibatkan K/L terkait pada tanggal: <ol style="list-style-type: none">1. 13 Januari 2025 (Kemendag)2. 14 Januari 2025 (Kemendag)3. 15 Januari 2025 (Kemendag)4. 3 Februari 2025 (Kemendag)5. 21 Januari 2025 (Kemendag)6. 24 Februari 2025 (Kemendag)
2	Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Permendag No 23 Tahun 2023	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan melibatkan K/L terkait pada tanggal: <ol style="list-style-type: none">1. 3 Februari 2025 (Zoom)2. 25 Februari 2025 (Zoom)
Triwulan II			
1	Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Kebijakan DHE-SDA	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan monev dengan melibatkan K/L terkait pada tanggal 11 Juni 2025.

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2025, sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi perjanjian kinerja. Pada Triwulan II ini juga telah dilaksanakan, seperti menghadiri Rapat Pembahasan Pembentukan Satgas Perundingan Perdagangan RI-AS, Satgas Peningkatan Iklim Investasi, dan Percepatan Perizinan Berusaha, serta Pelaksanaan Deregulasi; menghadiri Rapat Pembahasan Kendala Impor Baja Pra-Rekayasa di Kantor Staf Presiden; menghadiri Rapat Penyusunan RPP tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan

Antidumping, dan Tindakan Imbalan; menghadiri Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Permasalahan Importasi di Ruang Rapat Ditjen Daglu Kemendag; menghadiri Rakortas Pembahasan Perubahan Neraca Komoditas Pangan Triwulan II Tahun 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya melakukan rapat secara fisik menggunakan fasilitas kantor sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp42.460.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Sulitnya mengumpulkan Pejabat yang dapat mengambil keputusan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelaksanaan rapat secara fisik di Kantor.
3. Masih belum sinkronnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait isu-isu di lapangan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan peserta yang hadir dalam rapat dapat mengambil keputusan atau mewakili pejabat yang diundang.
2. Melaksanakan rapat di hotel apabila memungkinkan atau Rapat virtual melalui Zoom.
3. Sosialisasi dan koordinasi terus menerus dengan para pemangku kepentingan.

1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB

Latar Belakang

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB merupakan persentase dari nilai perdagangan besar dan eceran dibandingkan dengan PDB Nasional secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar maupun eceran, merupakan urat nadi perekonomian daerah dan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang krusial. Kinerja sektor ini secara langsung mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah. Pada tahun 2024, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor secara nasional berkontribusi 13,07% terhadap PDB Nasional, hanya di bawah Industri Pengolahan berdasarkan distribusi PDB menurut Lapangan Usaha.

Pengukuran kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDB bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Formula pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB $= (\text{Nilai perdagangan besar dan eceran}/\text{nilai PDB}) * 100\%$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB Tahun 2025 adalah sebesar 13,07%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025–2029. Adapun target triwulan II 2025 merujuk pada target tahun 2025 sebesar 13,07. Penetapan target ini dilihat dari tren-tren tahun sebelumnya di mana target diharapkan dapat dipertahankan dan stabil sampai akhir tahun.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB yang telah terealisasi sebesar 13,22 % (proyeksi capaian PDB pada Triwulan I Tahun 2025) atau mencapai 101,14% dari target Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TWI	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Persentase	13,07%	13,22%*	101,14%

*Keterangan: *) angka realisasi merupakan proyeksi berdasarkan Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB pada triwulan I tahun 2025*

Sampai dengan laporan ini disusun, Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Triwulan II Tahun 2025 belum diketahui karena jadwal rilis BPS pada awal bulan Agustus 2025. Data yang disampaikan merupakan proyeksi berdasarkan realisasi pertumbuhan PDB Triwulan I Tahun 2025 yang telah

dirilis pada Mei 2025. Merujuk pada realisasi Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB pada Triwulan I Tahun 205 sebesar 13,22% dan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 13,07%. Dari kedua proyeksi tersebut, angka Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB pada Triwulan II tahun 2025 diperkirakan setidaknya 13,22% dapat dicapai, sehingga kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diperkirakan mencapai 101,14%.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Pengumpulan data dan informasi terkait isu/permasalahan Pencapaian Target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Terlaksana	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Belanja Nasional Tahun 2025 sesuai surat undangan PI.04.02/02/D.III.M.EKON/02/2025
2	Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Program Belanja Masyarakat (BINA dan Launching Friday Mubarak)	Terlaksana	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Press Conference dan Launching BINA Lebaran sesuai surat undangan PI.04.02/04/D.III.M.EKON.02/03/2025
Triwulan II			
1	Penyelesaian Kendala Pencapaian Target Kontribusi Perdagangan	Terlaksana	Rapat Koordinasi penyelesaian kendala pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera

	Besar dan Eceran terhadap PDB		
2	Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Program Belanja Masyarakat	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan program belanja BINA Ramadhan di Pulau Sumatera. 2. Koordinasi persiapan pelaksanaan program BINA Back to School di Pulau Sumatera

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya melakukan rapat secara fisik menggunakan fasilitas kantor sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp21.230.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Sulitnya mengumpulkan Pejabat yang dapat mengambil keputusan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelaksanaan rapat secara fisik di Kantor.
3. Masih belum sinkronnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait isu-isu di lapangan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan peserta yang hadir dalam rapat dapat mengambil keputusan atau mewakili pejabat yang diundang.
2. Melaksanakan rapat di hotel apabila memungkinkan atau Rapat virtual melalui Zoom.
3. Sosialisasi dan koordinasi terus menerus dengan para pemangku kepentingan.

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

- 2.1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB
- 2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**2.1. Biaya
Transportasi
Logistik terhadap
PDB**

Latar Belakang

Biaya transportasi adalah biaya yang mencakup biaya transportasi primer dan sekunder menggunakan seluruh moda (darat, laut, udara). Biaya transportasi primer meliputi biaya perpindahan pengisian dari pabrik atau pusat distribusi ke pabrik atau pusat distribusi lain, dan pengangkutan inbound atas perpindahan barang jadi yang dibeli ke pabrik atau pusat distribusi. Biaya transportasi sekunder termasuk pembayaran kepada pengangkut, tunjangan penjemputan, peralatan truk atau kereta api dan biaya operasional.

Biaya transportasi terdiri dari:

- Biaya Jasa Angkutan Darat Selain Angkutan Rel
- Biaya Jasa Penunjang Angkutan
- Biaya Jasa Angkutan Laut
- Biaya Jasa Angkutan Udara
- Biaya Jasa Pos dan Kurir
- Biaya Jasa Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- Jasa Angkutan Rel

Pengukuran biaya transportasi logistik terhadap PDB bertujuan Memberikan gambaran kenaikan atau penurunan biaya transportasi logistik. Formula pengukuran adalah sebagai berikut:

Biaya Transportasi Logistik Terhadap PDB $= (\text{Nilai biaya transportasi logistik}/\text{nilai PDB}) * 100\%$
--

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB Tahun 2025 adalah sebesar 8,27%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025–2029.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB yang telah terealisasi sebesar 10,33% (proyeksi capaian) atau mencapai 120% dari target Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 2.1. Biaya	Persentase	8,27%*	10,33%**	120%

Transportasi Logistik terhadap PDB				
------------------------------------	--	--	--	--

Keterangan:

- *) Target merupakan nilai maksimal
- **) Angka realisasi merupakan proyeksi

Sampai dengan laporan ini disusun, Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB Triwulan II Tahun 2025 belum diketahui dikarenakan jadwal rilis Bappenas adalah pada akhir tahun. Proyeksi triwulan II tahun 2025 tidak berbeda dibandingkan realisasi triwulan II tahun 2024. Realisasi triwulan II didorong oleh penyelesaian RPerpres Pengutan Logistik Nasional yang berisikan rencana aksi 3 Strategi yang menyasar pada peningkatan efektivitas, efisiensi, keandalan, dan kolaborasi lintas sektor pemangku kepentingan logistik. Oleh karena itu, Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB pada Triwulan II diperkirakan setidaknya dapat mencapai 10,33%, sehingga kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diperkirakan mencapai 120%.

Pada tahun 2025, fokus kebijakan pengembangan logistik nasional yaitu Kebijakan Penguatan Logistik Nasional melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional, dengan pilar strategi sebagai berikut: (i) Penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang Logistik; (ii) Penguatan integrasi dan digitalisasi Layanan Logistik; dan (iii) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan Penyedia Jasa Logistik.

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional diarahkan untuk dapat menurunkan persentase biaya Logistik nasional terhadap produk domestik bruto sesuai target dalam dokumen perencanaan nasional serta peningkatan kinerja Logistik nasional dalam indikator kinerja Logistik global.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku pemrakarsa RPerpres Penguatan Logistik Nasional terus melakukan langkah-langkah koordinatif dalam rangka memenuhi fokus yang telah ditetapkan untuk tahun 2025, melalui antara lain penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan rapat-rapat koordinasi teknis dalam rangka penyusunan RPerpres tersebut.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

2.1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB

Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Pengumpulan data dan informasi terkait Pengembangan Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I pada tanggal 23 Januari 2025 dalam rangka pembahasan rumusan batang tubuh dan Rencana Aksi RPenguatan Logistik Nasional.
Triwulan II			
1	Penyelesaian isu/permasalahan terkait Pengembangan Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I pada tanggal 16 April 2025 dan serangkaian Rapat Koordinasi Tingkat Eselon II tahun 2025 secara bilateral dalam rangka pembahasan Rencana Aksi RPenguatan Logistik Nasional. Per tanggal 19 Juni 2025, Renaksi RPerpres mencakup 22 program, 25 sasaran program, 92 kegiatan, dan 179 keluaran.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah mengikuti pembahasan terkait isu *supply chain* secara umum, seperti Indo-Pasific Economic Framework. Beberapa kegiatan diantaranya: menghadiri secara virtual rapat persiapan Pertemuan IPEF Crisis Response Network (CRN) Table Top Exercise pada tanggal 8 Mei 2025; menghadiri secara virtual Pertemuan IPEF Crisis Response Network (CRN) Table Top Exercise pada tanggal 22 Mei 2025; menghadiri secara virtual Pertemuan IPEF SC Logistics and Movement of Goods pada tanggal 24 Juni 2025; National Coordinator (NC) Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025; menyelenggarakan zoom rapat koordinasi dan sesi wawancara implementasi MPAC 2025 pada tanggal 23 Mei 2025; Chairperson Logistics and Transport Sectoral Services Working Group – Coordinating Committee on Services (LTSSWG – CCS) ASEAN tahun 2024–2025 pada tanggal 2–6 Juni 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya melakukan rapat secara fisik menggunakan fasilitas kantor sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp42.460.000. Hasil

efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Keterlambatan penetapan RPJMN Tahun 2025–2029 sehingga menyebabkan perubahan draft batang tubuh dan rencana aksi RPerpres Penguatan Logistik Nasional.
2. Ego Sektoral antar Kementerian/Lembaga sehingga menyebabkan terhambatnya penyusunan RPerpres Penguatan Logistik Nasional.
3. Efisiensi Anggaran Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Perubahan atau penambahan rencana aksi berupa pelaksanaan rakor bilateral maupun trilateral dengan K/L terkait penyusunan RPerpres Penguatan Logistik Nasional secara insentif.
2. Perubahan pelaksanaan rencana rapat koordinasi yang sebelumnya fisik menjadi melalui media daring.

2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan

Latar Belakang

Waktu perputaran (*turnaround time*) di pelabuhan Tanjung Priok untuk kegiatan ekspor-impor adalah waktu yang dibutuhkan sebuah kapal untuk melakukan satu siklus lengkap di pelabuhan Tanjung Priok, mulai dari bersandar, bongkar muat, hingga akhirnya berlayar kembali. Waktu perputaran yang efisien sangat penting bagi efisiensi rantai pasokan dan kinerja pelabuhan secara keseluruhan. Waktu perputaran yang lama dapat menyebabkan penumpukan kapal di pelabuhan, keterlambatan pengiriman barang, dan peningkatan biaya logistik.

Pengukuran rata-rata waktu perputaran di pelabuhan bertujuan memberikan gambaran kinerja pelabuhan dalam memperlancar kegiatan arus lalu lintas transportasi angkutan laut sebagai penunjang kegiatan ekspor dan impor secara umum. Formula pengukuran adalah sebagai berikut:

Waktu Perputaran di Pelabuhan (TT)

$$= (\text{Jumlah Waktu Keberangkatan Aktual} - \text{Waktu Tiba Aktual}) : \text{Jumlah Kapal}$$

Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok = Σ Rata-rata TT Seluruh Bulan : 12

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan Tahun 2025 adalah sebesar 1,7 Hari. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan yang telah terealisasi sebesar 1,29 Hari atau mencapai 120% dari target Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	Persentase	1,7 Hari	1,29 Hari	120%

*) Target merupakan nilai maksimal

Pada tahun 2025, fokus kebijakan pengembangan logistik nasional yaitu Kebijakan Peningkatan Kinerja Pelabuhan dan Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Kebijakan Pembangunan Dashboard Kinerja Logistik Nasional, serta Kebijakan Penyusunan RPerpres Penguatan Logistik Nasional.

Kemenko Perekonomian menginisiasi pembangunan Dashboard Kinerja Logistik Nasional dengan asistensi dari Bank Dunia guna memantau kinerja logistik domestik maupun internasional dari sisi efisiensi melalui dimensi waktu yang dikembangkan mengikuti kaidah *best practice international* (pendekatan *Supply Chain Tracking Data/Logistic Performance Index*) serta untuk mendukung pembuatan kebijakan di bidang logistik dalam rangka menurunkan biaya logistik nasional terhadap PDB.

Indikator kinerja logistik internasional yang akan mengikuti indikator dalam perhitungan *Logistics Performance Index* (LPI) oleh Bank Dunia, meliputi: (i) Port indicator: *Ship Turnaround Time at Port*; (ii) Container indicator: *Container Dwell Time Import & Export*; (iii) Container Indicator: *Consolidated Dwell Time Import & Export*; (v) Postal indicator: *Postal Delivery Time Import*; (vi) Airport indicator: *Aviation Dwell Time Import*;

Indikator kinerja logistik domestik meliputi: (i) Port indicator: *Ship Turnaround Time Domestic*; (ii) Inter-Island indicator: *Container Dwell Time Outbound & Inbound*.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan			
No	Rencana Aksi	Triwulan I	
		Status	Keterangan
1	Pengumpulan data dan informasi terkait Standarisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I pada tanggal 23 Januari 2025 dalam rangka pembahasan rumusan batang tubuh dan Rencana Aksi RPenguatan Logistik Nasional.
Triwulan II			
1	Pengumpulan data dan informasi terkait Standarisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas	Terlaksana	Telah diselenggarakan kunjungan kerja dalam rangka pembahasan indikator pelabuhan dalam Dashboard Kinerja Logistik Nasional di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 8 Mei 2025.

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2025, sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi perjanjian kinerja. Pada Triwulan II ini juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan lainnya, seperti menyelenggarakan serangkaian rapat koordinasi back to back dengan seluruh stakeholder terkait selama dua minggu dari tanggal 5 Mei – 16 Mei 2025; Rapat one-on-one dengan pemangku kepentingan terkait khusus untuk indikator internasional yakni *Ship Turnaround Time*, *Container Dwell Time Import*, dan *Container Dwell Time Export* pada tanggal 16–23 Juni 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya melakukan rapat secara fisik menggunakan fasilitas kantor sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp21.230.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Efisiensi Anggaran Kementerian/Lembaga.
2. Ego Sektoral antar Kementerian/Lembaga sehingga menyebabkan terhambatnya koordinasi terkait data penunjang indikator yang diperlukan di dalam Dashboard Kinerja Logistik Nasional.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Perubahan atau penambahan rencana aksi berupa pelaksanaan rakor bilateral maupun trilateral dengan K/L penyedia data yang akan digunakan di dalam Dashboard Kinerja Logistik Nasional secara insentif.
2. Perubahan pelaksanaan rencana rapat koordinasi yang sebelumnya fisik menjadi melalui media daring.

3

Sasaran Program: Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu IKU 3.1 Indeks Literasi Keuangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Indeks Literasi Keuangan Latar Belakang

Keuangan

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Literasi keuangan diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu (i) pengetahuan, (ii) keterampilan, (iii) keyakinan, (iv) sikap, dan (v) perilaku.

Penggunaan akun/ layanan keuangan formal adalah penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan, seperti jumlah rekening tabungan dan kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal, jumlah rekening uang elektronik terdaftar (*registered*) pada penerbit uang elektronik, persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga

keuangan formal. Literasi keuangan yang memadai mendorong meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu, serta perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan. Untuk mengukur indeks literasi keuangan konvensional dilakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Literasi Keuangan Tahun 2025 adalah sebesar 57,25. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025–2029. Adapun target Tahun 2025 sebesar 57% tersebut diproyeksikan menjadi target triwulan II sehingga realisasi capaian Triwulan II 2025 yaitu sebesar 57% (mencapai 100%). Tingkat literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK yang akan dilakukan pada semester II Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.1. Indeks Literasi Keuangan	Persentase	57	57*	100%

**) angka target tahunan (tingkat literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK yang dilakukan pada semester II sehingga hasil survei diperoleh pada akhir tahun).*

Realisasi capaian Triwulan II masih bersifat proyeksi, proyeksi ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan konvergensi program yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga DNKI, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pekerja migran, perempuan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), masyarakat di daerah 3T, pelajar/santri, dan pemuda sebagaimana kelompok Sasaran yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNK).

Upaya dan program tersebut dilakukan melalui edukasi keuangan yang turut melibatkan partisipasi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), pemberdayaan hak properti masyarakat yang terintegrasi, intermediasi fungsi lembaga keuangan dengan *branchless office* dan digitalisasi keuangan, elektronifikasi program pemerintah bagi kelompok rentan dan pelaku UMK melalui program perlindungan sosial dan subsidi pemerintah, penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan dan pelaksanaan *market conduct*,

penyempurnaan regulasi, serta peningkatan infrastruktur dasar dan teknologi informasi yang mendukung literasi keuangan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

3.1. Indeks Literasi Keuangan			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Pengumpulan data dan informasi terkait peningkatan indeks literasi keuangan	Terlaksana	<p>1. Koordinasi Awal Peningkatan Literasi Keuangan Konvensional bagi Segmen Prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi POKJA I: Edukasi DNKI di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2025 • Rapat Koordinasi POKJA IV: Pelayanan Keuangan Sektor Pemerintah DNKI di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2025 • Rapat Koordinasi terkait Akselerasi Percepatan Kepemilikan Akun Bank Berbasis Keluarga di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2025 <p>2. Sosialisasi dan Edukasi terkait Literasi Keuangan Konvensional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Keuangan Inklusif bagi Anggota Koperasi Wanita di Surakarta pada tanggal 23 Januari 2025 • Creative Talk dan Festival Inklusi Keuangan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Banyumas pada tanggal 21-22 Februari 2025
Triwulan II			
1	Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting peningkatan indeks literasi keuangan	Terlaksana	<p>1. Koordinasi awal Peningkatan Literasi Keuangan Konvensional bagi Segmen Prioritas.</p> <p>2. Sosialisasi dan Edukasi terkait Literasi Keuangan Konvensional.</p>

Rincian pelaksanaan Rencana Aksi triwulan II beserta hasil kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koordinasi awal peningkatan literasi keuangan konvensional bagi segmen prioritas
 - Rapat Peluang Kolaborasi antara PIP dan S-DNKI dalam Peningkatan Inklusi Keuangan dalam bidang edukasi dan literasi akses layanan keuangan/pembiayaan usaha bagi masyarakat segmen prioritas di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2025
 - Rapat Koordinasi antar Pokja dan Sekretariat DNKI di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2025
 - Rapat Persiapan Strive Learning Network di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2025
 - Diskusi Implementasi Program Inklusi Keuangan Mendukung Keluarga Miskin Ekstrem di Bandung Barat pada tanggal 23 Juni 2025
2. Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan konvensional
 - Sosialisasi Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025, dengan tema Inklusi Keuangan untuk Mendukung Asta Cita di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2025
 - Sosialisasi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2025.
 - Monitoring dan Evaluasi Program Keuangan Inklusif Mendukung Keluarga Miskin Ekstrem di Bandung Barat pada tanggal 24 Juni 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya melakukan rapat secara fisik menggunakan fasilitas kantor sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp42.460.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan berupa efisiensi anggaran dan awarness stakeholder.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan melalui peningkatan sinergi dengan Kementerian/Lembaga/Mitra dalam pelaksanaan kegiatan, adaptasi nomenklatur serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Mitra.

4

Sasaran Program: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu IKU 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Indeks Efektivitas Latar Belakang

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Perniagaan dan Ekonomi Digital

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah:

- (1) Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan
- (2) Pengembangan Ekspor Nasional
- (3) Penguatan Ekosistem Logistik Nasional
- (4) Pengembangan Ekonomi Digital
- (5) Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator internal business yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah ditetapkan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektifitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

Indeks efektifitas SKP

$$= \sqrt[5]{(SKP\ AD\ 1 \times SKP\ AD\ 2 \times SKP\ AD\ 3 \times SKP\ AD\ 4 \times SKP\ AD\ 5)}$$

Nilai Akhir Indeks Efektifitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

- Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 – 100
- Efektif (3), rentang nilai 81 – 90
- Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 – 80
- Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 adalah sebesar 3 dari 4 (Baik).

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi sebesar 1 dengan rentang nilai <70 atau mencapai 33,3% dari target Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	3 dari 4	1	33,3%

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital diperoleh dari akar lima dari Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di unit Eselon II: Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor; Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional; Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital; serta Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi adalah 44,41 atau sama dengan skala 1. Hal ini dikarenakan sebagian besar Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian yang dilaksanakan di unit Eselon II Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan

dan Ekonomi Digital masih berada pada tahap pertama (Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan) atau kedua (Penyusunan Alternatif Rekomendasi).

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

<i>4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital</i>			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait kegiatan Pengendalian Impor	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Nota Dinas Konfirmasi Kesiapan Kementerian/Lembaga Untuk Perubahan Lartas Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian dan Usulan Pelaksanaan Rakortas Tingkat Menteri terkait Perubahan Lartas Impor sesuai nota dinas nomor PI.02.02/15/D.III.M.EKON/02/2025. 2. Penyampaian Nota Dinas Usulan Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Mengenai Perubahan Ketentuan Larangan dan Pembatasan Impor dari Kementerian Perdagangan sesuai nota dinas nomor PI.02.02/11/D.III.M.EKON/02/2025.
2	Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi	Terlaksana	<p>Koordinasi Pembahasan Cyber Security Centre:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PI.02.03/11/D.III.M.EKON/03/2025 pada 11 Maret 2025 Perihal Rapat Koordinasi Terkait Cyber Security Centre yang dilaksanakan pada 11 Maret 2025. Hasil rapat ini ditindaklanjuti dengan Notula: KWU.06.02/03/D.III.M.EKON.5/03/2025; b. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PI.04.02/13/D.III.M.EKON/03/2025 pada 26 Mei 2025 Perihal Undangan Rapat Lanjutan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas

			<p>Keamanan Siber di Indonesia yang dilaksanakan pada 26 Maret 2025;</p> <p>Koordinasi Pengembangan SDM di Bidang Ekonomi Digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.02/22/D.III.M.EKON.5/02/2025 pada 12 Februari 2025 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM di Bidang Ekonomi Digital. Hal ini ditindaklanjuti risalah rapat No: KWU.06.02/20.1/D.III.M.EKON.5/02/2025; b. Koordinasi pengembangan SDM dibidang ekonomi digital juga ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan pelaku usaha yang telah menyediakan pelatihan/upskilling/reskilling dibidang digital seperti IBM. Adapun hasil koordinasi ini tercantum dalam Nota Dinas KWU.06.01/15/D.III.M.EKON.5.1/03/2025
Triwulan II			
1	Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan serangkaian rapat koordinasi bilateral bersama KL mengenai pembahasan rencana aksi pada pilar 1: strategi penguatan infrastruktur konektivitas, layanan <i>backbone</i>, dan sarana penunjang Logistik;</p> <p>Per tanggal 19 Juni 2025, Renaksi RPerpres mencakup 22 program, 25 sasaran program, 92 kegiatan, dan 179 keluaran.</p>
2	Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Putusan MA No. 6P/HUM/2024 terkait Permohonan Uji Materiil Terhadap Permendag No. 25 Tahun 2021 sesuai surat PI.04.04/05/D.III.M.EKON.02/03/2025; 2. Penyampaian Laporan Hasil Koordinasi terkait Surat Hardianto Gosali kepada Menko Perekonomian tentang Pemeriksaan/Penyelidikan Dugaan Pelanggaran PT Trive Invest Futures (Pialang Berjangka); 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi terkait tindak lanjut surat Dewan Pengurus Pusat ASPADIN (Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan) terkait SE Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 sesuai undangan

			<p>nomor PI.04.02/16/D.III.M.EKON.2/06/2025;</p> <p>4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Revisi Permendag No. 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia sesuai undangan nomor PI.04.06/13/D.III.M.EKON.2/05/2025;</p> <p>5. Penyelenggaraan Diskusi Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (terkait pendaftaran TPP SIR) sesuai undangan nomor PI.04.06/14/D.III.M.EKON.2/05/2025;</p> <p>6. Penyampaian Nota Dinas Bapak Deputi kepada Bapak Menko Melaporkan Hasil Audiensi dengan APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) terkait Perizinan di Ritel Modern.</p>
3	Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi	Terlaksana	<p>Koordinasi pembahasan <i>Cyber Security Centre (lanjutan)</i></p> <p>a. Koordinasi berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.04/64 /D.III.M.EKON.5/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025 Perihal Undangan Koordinasi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Keamanan Siber di Indonesia yang dilaksanakan pada 28 Mei 2025. Hal ini ditindaklanjuti dengan Notula No:B/KWU.06.03/33/D.III.M.EKON.5/05/2025 pada 2 Juni 2025;</p> <p>b. Koordinasi berdasarkan undangan KWU.06.04/55/D.III.M.EKON.5/05/2025 tertanggal 19 Mei 2025. Hal ini ditindaklanjuti dengan Notula No:B/KWU.06.03/29/D.III.M.EKON.5/05/2025 pada 22 Mei 2025;</p> <p>Koordinasi dibidang Inovasi dan Investasi</p> <p>a. Koordinasi pengembangan quantum safe Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.04/53/D.III.M.EKON.5/05/2025 tertanggal 15 Mei 2025 Perihal Workshop Quantum Safe yang dilaksanakan pada 27</p>

		<p>Mei 2025. Hasil rapat ini ditindaklanjuti dengan Notula: B/KWU.06.03/35/D.III.M.EKON.5/06/2025 pada 10 Juni 2025;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Koordinasi pengembangan quantum computing Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.04/52/D.III.M.EKON.5/05/2025 tertanggal 15 Mei 2025 c. Koordinasi terkait sinkronisasi Satgas AI Komdigi dan Satgas Semikonduktor dan AI yang ditindaklanjuti dengan nota dinas Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No:KWU.06.02/45/D.III.M.EKON.5/05/2025 pada 14 Mei 2025 <p>Koordinasi Permasalahan Kemitraan Pengemudi Online dengan berdasarkan undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.04/65/D.III.M.EKON/06/2025. Hal ini ditindaklanjuti dengan penyampaian notula rapat No:T/KWU.06.04/38/D.III.M.EKON/06/2025 pada 12 Juni 2025</p> <p>Koordinasi dukungan kehadiran UMK Binaan dalam FGD Evaluasi Video Edukasi untuk UMK: Perizinan, Perlindungan Konsumen, dan E-Commerce dengan berdasarkan undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.02/43/D.III.M.EKON/04/2025 tertanggal 16 April 2025</p> <p>Koordinasi dibidang infrastruktur terkait sinkronisasi program kerja infrastruktur ekonomi digital sebagaimana surat Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No:KWU.06.01/67/D.III.M.EKON.5/06/2025 tertanggal 5 Juni 2025</p> <p>Koordinasi dibidang SDM terkait Update Digital Skill Dashboard Project yang direncanakan untuk digabungkan dengan aplikasi digital talent Komdigi sebagaimana yang diselenggarakan pada 16 Mei 2025 dan ditindaklanjuti dengan nota dinas No: KWU.06.01/24.1/D.III.M.EKON.5/05/2025 tertanggal 17 Mei 2025</p>
--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Menghadiri ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Negotiation sebagai *focal point* Pemri. Pada tanggal 17 April 2025 telah dihadiri secara virtual rapat persiapan SJC ACFTA 3.0 Upgrade Negotiation. Pada tanggal 28–29 April 2025 telah dihadiri secara virtual Pertemuan Special Joint Committee (SJC) of ACFTA 3.0 Upgrade Negotiation. Saat ini draft text ACFTA 3.0 sedang dalam proses legal scrubbing oleh Working Group on Legal and Institutional Issues (WGLII), dan rencananya akan ditandatangani dalam kesempatan pertemuan the 28th ASEAN-China Summit pada bulan Oktober 2025.
- b. Menghadiri ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) sebagai focal point Pemri. Pada tanggal 3 Juni 2025 telah dihadiri secara virtual rapat persiapan pertemuan the 22nd AKFTA-IC (Implementing Committee).
- c. Menjadi anggota Pemri dalam pembahasan MoU on Strengthening Economic Cooperation in Industrial and Supply Chain RI-RRC. Pada tanggal 8 Mei 2025 telah dihadiri secara virtual Rapat Pembahasan Usulan Konsep MoU on Strengthening Economic Cooperation in Industrial and Supply Chain RI-RRC.
- d. Menjadi anggota Pemri dalam Forum Pembahasan Rencana MoU Kerja Sama Supply Chain RI-Korea. Pada tanggal 18 Juni 2025 telah dihadiri secara virtual rapat jaring masukan potensi kerja sama rantai suplai RI-Korea.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya melakukan rapat secara fisik menggunakan fasilitas kantor atau secara virtual sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp21.230.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Keterlambatan penetapan RPJMN Tahun 2025–2029 sehingga menyebabkan perubahan draft batang tubuh dan rencana aksi RPerpres Penguan Logistik Nasional.
2. Ego Sektoral antar Kementerian/Lembaga sehingga menyebabkan terhambatnya penyusunan RPerpres Penguan Logistik Nasional.
3. Efisiensi Anggaran Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Perubahan atau penambahan rencana aksi berupa pelaksanaan rakor bilateral maupun trilateral dengan K/L terkait penyusunan RPerpres Penguatan Logistik Nasional secara insentif.
2. Perubahan pelaksanaan rencana rapat koordinasi yang sebelumnya fisik menjadi melalui media daring.

5

Sasaran Program: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu IKU 5.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Indeks

Kepuasan

Penyelenggaraan

Sinkronisasi,

Koordinasi, dan

Pengendalian

Bidang Perniagaan

dan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2)

Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas; (2) Tidak Puas; (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian

$$= \frac{(Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1 + Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2 + Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3 + Indeks Kepuasan Layanan Asdep 4 + Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5)}{5}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 adalah sebesar 3 dari 4 (Baik). Adapun target triwulan II 2025 adalah sebesar 3 dari 4 (Baik).

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi sebesar 3,41 atau mencapai 113,6% dari target Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi	% Kinerja
IKU 5.1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	3 dari 4 (baik)	3,41	113,6%

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital diperoleh dari rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di unit Eselon II: Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor; Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional; Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital; serta Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris diperoleh nilai **rata-rata Indeks 3,41 (Puas)** dengan jumlah responden di unit eselon II masing-masing sebanyak 40 orang yang tersebar di Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

5.2. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Memberikan arahan penyusunan kuesioner pengukuran Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	Terlaksana	Arahan Penyusunan kuesioner pengukuran survei kepuasan layanan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Triwulan I telah dilakukan kepada setiap keasdepan di lingkup Deputi bahwa penyusunan kuesioner dilakukan melalui <i>Google Form</i> agar lebih efektif dan efisien.
Triwulan II			
1	Memberikan arahan pelaksanaan Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	Terlaksana	Arahan Penyusunan kuesioner pengukuran survei kepuasan layanan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Triwulan II telah dilakukan kepada setiap keasdepan di lingkup Deputi bahwa penyusunan kuesioner dilakukan melalui <i>Google Form</i> agar lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya melakukan rapat secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*, serta mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp4.500.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Belum terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam memberikan arahan penyusunan Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II Tahun 2025.

6	Sasaran Program: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas
---	--

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan RB Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1. Persentase Pelaksanaan RB Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan persentasi pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian. Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditargetkan sebanyak 12 rencana aksi, sebagai berikut:

1. Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (ZI) (1 kegiatan pada triwulan IV);
2. Nilai SAKIP (2 kegiatan pada triwulan I, 1 kegiatan pada triwulan II, 1 kegiatan pada triwulan III, 2 kegiatan pada triwulan IV);
3. Tingkat Digitalisasi Arsip (1 kegiatan pada masing-masing triwulan I-IV).

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital:

% Pelaksanaan Renaksi RB

$$= (\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan} : \text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}) \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 adalah sebesar 85%. Adapun target triwulan II 2025 adalah sebesar 40%.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan RB Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 120% dari target Triwulan I Tahun 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	Realisasi Tahunan	% Kinerja
IKU 6.1. Persentase Pelaksanaan RB Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	40%	100%	45,45%	120% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

5.1. Persentase Pelaksanaan RB Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja	Terlaksana	telah terlaksana Rapat Internal Lingkup Kedeputian III pembahasan persiapan penetapan perjanjian kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025. selanjutnya, Draft penyusunan perjanjian kinerja Lingkup Kedeputian III Tahun 2025 dilaksanakan pada Triwulan II.
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan telah dilaksanakan pada Triwulan-I 2025.
3	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI telah dilaksanakan melalui Nota Dinas dan Sosialisasi SRIKANDI.

Triwulan II			
-------------	--	--	--

1	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan telah dilaksanakan pada Triwulan-II 2025.
2	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Penguatan persiapan pengawasan kearsipan internal lingkup Kedeputian III dilakukan melalui pendampingan pengelolaan arsip aktif telah dilaksanakan bersama Biro Umum dan Sumber Daya Manusia dan diwakilkan oleh Sekretaris Deputi pada tanggal 27 Mei 2025.

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025, sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi perjanjian kinerja. Pada Triwulan I ini telah dilaksanakan kegiatan lainnya seperti Rapat Pimpinan yang membahas program dan anggaran di unit Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dan efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.620.000. Media yang digunakan yaitu melalui *google formulir* dan koordinasi secara daring antara Tim Deputi bersama responden Keasdepan. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan yang akan dilakukan pada kegiatan yang akan datang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Tidak terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam Penyusunan Laporan Kinerja TW-II, Serta pengelolaan dan pemanfaatan Srikandi terlaksana dengan baik pada TW-II Tahun 2025.

Jakarta, 14 Juli 2025

Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital



Ali Murtopo